

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- , *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
- Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Ambar Teguh Sulistiyani (Ed.), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- , *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- C.S.T. Kansil dan Christine.S.T.Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Daryanto dan Ismanto Setyobudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Cetakan Kesatu, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Studi Tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, Cetakan Kesatu, Unissula Press, Semarang, 2008.

Fandi Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta, 1996.

—————, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Andi, Yogyakarta, 1997.

H.A.S. Moenier, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

—————, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Hardjosoekarto Sudarsono, *Strategi Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1996.

I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.

Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra, Malang, 2001.

—————, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Banyumedia, Malang, 2004.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan Keempat, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014.

- , *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- , *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- M. Mas'ud Said, *Birokrasi Di Negara Birokratis*, UMM Press, Malang, 2007.
- Moeljarto Tjokrowinoto, dkk., *Birokrasi Dalam Polemik*, Cetakan III, Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta, 2011.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- N.M. Spelt dan J.B.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yundika, Surabaya, 1993.
- Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Paimin Napitupulu, *Seri Ilmu Pemerintahan, Pelayanan Publik & Customer Satisfaction, Prinsip-prinsip Dasar Agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi Pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1979.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- , *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- S.P. Siagian, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Sad Dian Utomo (Ed.), *Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Inovasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan*, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership, Jakarta, Agustus 2010.

- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- , *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara, Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- , *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Syaukani HR, et.al., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.
- W. Riawan Tjandra, dkk., *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.

Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

—————, *Etika Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Keni Media, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang*.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Demak* jo. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Demak*.

Keputusan Bupati Demak Nomor : 130/279/2013 tentang *Penetapan Kecamatan Se-Wilayah Kabupaten Demak Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kecamatan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang ***Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak***.

C. Jurnal/Makalah :

Andrew Gormico, Redatin Parwadi, dan Endang Indri Listiani, ***Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak***, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013.

Fahmi, D.B. Paranoan, dan Enos Paselle, ***Evaluasi Kebijakan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Kasus Kecamatan Samboja)***, eJournal Administrative Reform, Vol. 1 No. 2, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL, Samarinda, 2013.

Jailani, ***Pelayanan Publik : Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam***, Jurnal Al-Bayan, Vol. 19 No. 27, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Aceh, Januari-Juni 2013.

Moh. Iskandar Madani, ***Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delekatif Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Parigi Mautong Propinsi Sulawesi Tengah)***, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 3 No. 1, Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah, Februari 2011.

Muhammadiyah, ***Islam dan Good Governance : Perspektif Hak Asasi Untuk Pelayanan Publik***, Al-Fikr, Vol. 16. No. 2, Fakultas Sospol Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2012.

Riko Eka Kusuma, ***Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***, Perspektif, Vol. XiX No. 2, Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Surabaya, Edisi Mei 2014.

Yuniarti, ***Database Good Practice, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Sragen***, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tanpa Tahun.

D. Website :

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Pelayanan Publik Menurut Islam*, sebagaimana diakses dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>, pada tanggal 17 Februari 2016, waktu : 1.46 pm.